

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692004/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 22.755.583.000 (DUA PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 22.755.583.000
Rp. 22.755.583.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 22.755.583.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 22.755.583.000

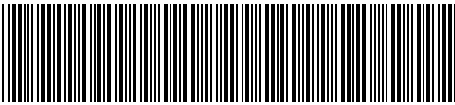
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
I A. INFORMASI KINERJA



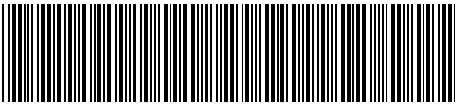
DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				22.755.583.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				22.755.583.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen					
		2. 01	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	21.706.102.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Kerja Sama		1.00	Layanan	249.720.000
		02	EBA.959	Layanan Protokol		1.00	Layanan	99.240.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	116.464.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	21.214.292.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	18.146.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	8.240.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		40,00	Unit, m2, Paket	785.291.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		40.00	Unit	785.291.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		146,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	159.212.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		146.00	Orang	159.212.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6,00	Layanan, Rekomendasi	104.978.000
Rincian Output	:	01	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	12.000.000
		02	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	18.902.000
		03	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	32.960.000
		04	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Layanan	7.996.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
I A. INFORMASI KINERJA

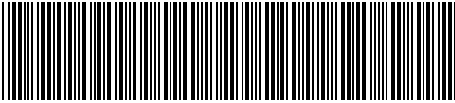


DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Layanan, Rekomendasi		
05	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	33.120.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7929-9461-8058-0304

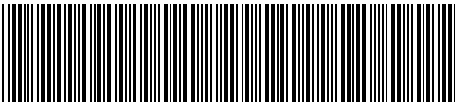
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	22.755.583.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	22.755.583.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



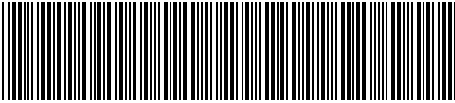
DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	13.372.812	8.597.480	785.291	-	-	22.755.583	01 . 55	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.372.812	8.597.480	785.291	-	-	22.755.583		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.372.812	8.597.480	785.291	-	-	22.755.583		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	13.372.812	8.333.290	-	-	-	21.706.102		
01	RM	13.372.812	8.333.290	-	-	-	21.706.102		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	-	785.291	-	-	785.291		
01	RM	-	-	785.291	-	-	785.291		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	159.212	-	-	-	159.212		
01	RM	-	159.212	-	-	-	159.212		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	104.978	-	-	-	104.978		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

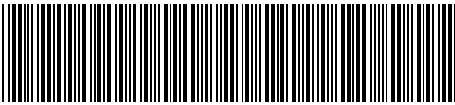
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	104.978	-	-	-	104.978	139	
JUMLAH		13.372.812	8.597.480	785.291	-	-	22.755.583		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

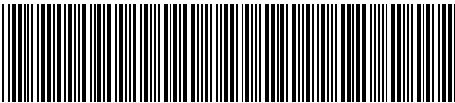
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.482.004	1.712.998	2.559.494	2.545.081	1.741.889	2.684.868	1.715.529	1.684.621	1.681.213	1.766.783	1.674.916	1.506.188	22.755.583
		BELANJA PEGAWAI	967.961	967.961	1.837.928	967.963	968.745	1.819.146	967.961	967.961	985.628	967.961	967.961	985.636	13.372.812
		BELANJA BARANG	514.043	745.037	721.566	791.827	773.144	865.722	747.568	716.660	695.585	798.822	706.955	520.552	8.597.480
		BELANJA MODAL	0	0	0	785.291	0	0	0	0	0	0	0	0	785.291
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.482.004	1.712.998	2.559.494	2.545.081	1.741.889	2.684.868	1.715.529	1.684.621	1.681.213	1.766.783	1.674.916	1.506.188	22.755.583
		51 BELANJA PEGAWAI	967.961	967.961	1.837.928	967.963	968.745	1.819.146	967.961	967.961	985.628	967.961	967.961	985.636	13.372.812
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	514.043	745.037	721.566	791.827	773.144	865.722	747.568	716.660	695.585	798.822	706.955	520.552	8.597.480
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	785.291	0	0	0	0	0	0	0	0	785.291

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
IV A. B L O K I R



DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692004] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

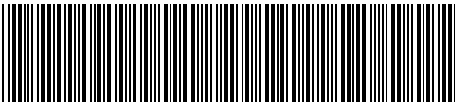
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7929-9461-8058-0304

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692004] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA